

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah



KUARTAL I
TAHUN 2025

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGUNA LAYANAN
BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR
KUARTAL I TAHUN 2025

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019

Disahkan di Makassar
Pada Hari Rabu, 30 April 2025

KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR



Euis Ratnasari, ST., M.S.E.
NIP : 197804282005022001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai Indeks Persepsi Anti Korupsi di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Balai Diklat Industri Makassar mengadakan Survei Persepsi Anti Korupsi. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan survei dilakukan untuk mengetahui persepsi pengguna dalam memperoleh pelayanan di Balai Diklat Industri Makassar, yang dilakukan secara elektronik.

Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan dan pengguna layanan pada Balai Diklat Industri Makassar.

Wassalamu 'alaikumWr. Wb.

Makassar, 30 April 2025

Kepala Balai Diklat Industri Makassar


Eulis Ratnasari, S

Euis Ratnasari, ST,. M.S.E.

NIP : 197804282005022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem penyelenggaraan pemerintahan pada setiap Kementerian/ Lembaga diharuskan berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, setiap K/L diharuskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan publik.

Dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap K/L. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Balai Diklat Industri Makassar sebagai unit eselon III penyelenggara pelayanan publik, maka penting dilakukan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebagai dukungan dan peran aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Indeks IPAK merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk instansi pemerintah di Indonesia yang dikembangkan oleh Transparency International Indonesia. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan good governance. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan

pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Balaia Diklat Industri Makassar.

B. Tujuan

Tujuan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan Pelayanan pada Balai Diklat Industri Makassar sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.

C. Sasaran

1. Terselenggaranya pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan transparan.
2. Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan publik sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan anti gratifikasi.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

E. Definisi

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

9 (Sembilan) tindakan korupsi terdiri dari:

1. Penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas Negara;
2. Suap;
3. Illegal profit;
4. Secret transaction;
5. Hadiah;
6. Hibah;
7. Penggelapan;
8. Kolusi;
9. Nepotisme

BAB II

METODOLOGI

A. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B. Populasi dan Sampel

Responden ditentukan sesuai dengan jumlah pengguna layanan masing-masing unit dengan memperhatikan tingkat keterwakilan jumlah sampel terhadap populasi melalui sistem pemilihan secara acak. Responden yang dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan masing-masing unit pelayanan.

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan (Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Adapun sampel yang diambil adalah sebanyak 75 orang populasi penelitian yang diambil dari alumni dan mitra BDI Makassar (IKM, Industri, Dinas maupun Asosiasi) pengguna layanan Balai Diklat Industri Makassar, Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik simple random sampling.

C. Pelaksanaan Dan Teknik Survei

Survei indeks persepsi korupsi terhadap pelayanan pada Balai Diklat Industri Makassar dilakukan melalui metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menyebarluaskan elektronik kuesioner (esurvey) sebagai alat pengumpul data kepada populasi

responden yaitu alumni dan mitra BDI Makassar (IKM, Industri, Dinas maupun Asosiasi) selaku pengguna layanan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling atau teknik pengambilan sampel dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian yaitu Balai Diklat Industri Makassar dan masyarakat yang menerima pelayanan selama Quartal I Tahun 2025. Adapun tahapan survei adalah sebagai berikut:

1. Persiapan

- a) Membuat daftar pertanyaan pada kuesioner untuk survei FAK.
- b) Membangun e-survey berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun.
- c) Membuat surat pengantar pengisian survei melalui e-survey

2. Proses Survei

- a) Pelaksanaan e-survey dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SKM.SURVEIKU.
- b) Mengunggah surat pengisian data e-survey kepada alumni dan mitra BDI Makassar (IKM, Industri, Dinas maupun Asosiasi) yang telah menerima layanan dari Balai Diklat Industri Makassar.
- c) Penginputan data survei persepsi anti korupsi melalui Esurvey dilakukan dengan mengakses link berikut: <http://skm.surveiku.com>
- d) Melakukan pengecekan secara berkala pada sistem e-survey untuk mengetahui perkembangan SKM.SURVEIKU.

D. Teknik Analisis Dan Evaluasi

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi anti korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 4. Nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah, dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi anti korupsi atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 - 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 1 - 4. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 - 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin bersih dari korupsi.

E. Prosedur Survei

Responden dapat mengisi e-survey persepsi korupsi terhadap pelayanan Balai Diklat Industri Makassar baik melalui komputer/laptop/smartphone. Sebelum menjawab e-survey, maka responden harus mengisi data-data pribadi yang terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, Nomor Telp dan pekerjaan. Untuk mengetahui tingkat IPAK Balai Diklat Industri Makassar, maka responden diharapkan dapat memberikan penilaian yang obyektif dari berbagai indikator yang ada dalam e-survey. Adapun indikator-indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Manipulasi Peraturan
Penyalahgunaan Jabatan
2. Menjual Pengaruh
3. Hadiah
4. Percaloan
5. Perbuatan Curang
6. Transaksi Rahasia

BAB III
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (FAK)

A. Profil Responden

1. Jenis Kelamin Responden

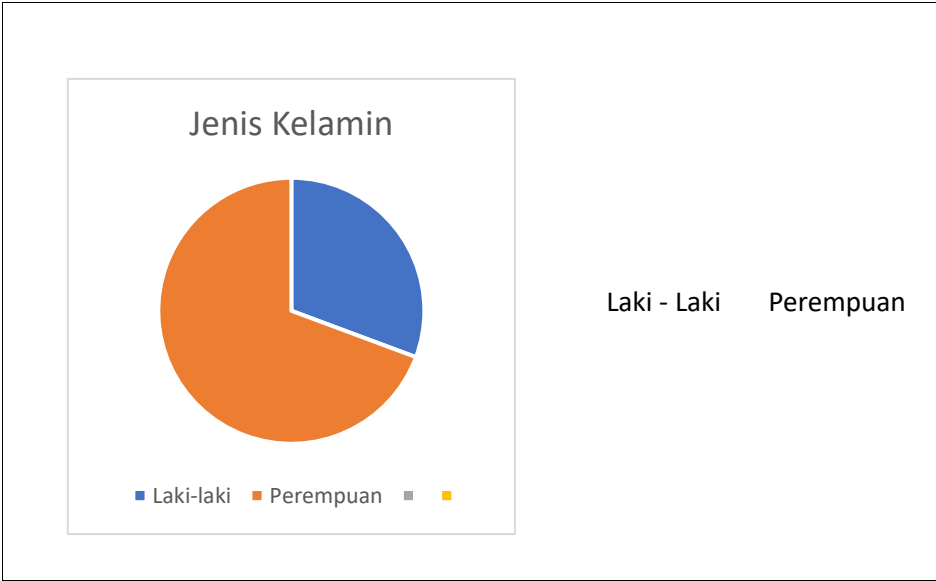
Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa total pengguna layanan yang mengisi survei sebanyak 75 reponden, dimana pengguna layanan yang berjenis kelamin Laki-Laki sebanyak 23 orang atau 30,67% dan yang berjenis kelamin Perempuan sebanyak 52 orang atau 69,33%.

Tabel Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	
		Jumlah	Persentase
1.	Laki - Laki	23	30,67%
2.	Perempuan	52	69,33%
Jumlah		75	100%

Tabel I. Jenis Kelamin Responden

Grafik Jenis Kelamin Responden



Grafik 1. Jenis Kelamin Responden

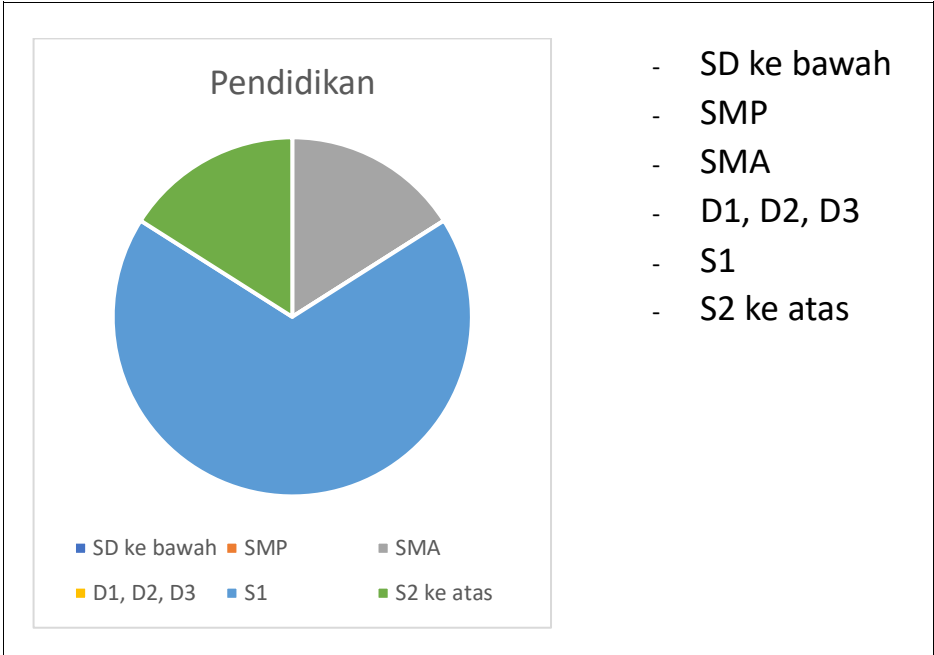
2. **Tingkat Pendidikan Responden**

Dari hasil survei yang telah dilakukan diperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengguna layanan pada Balai Diklat Industri Makassar mayoritas memiliki latar belakang tingkat pendidikan tinggi.

No	Jenis Pendidikan	Frekuensi	
		Jumlah	Persentase
1.	SD	0	0,00%
2.	SMP	0	0,00%
3.	SMA	12	16,00%
4.	Diploma 1,2,3	0	0,00%
5.	Strata 1	51	68,00%
6.	Strata 2 ke atas	12	16,00%
Jumlah		75	100%

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Grafik 2. Tingkat Pendidikan Responden

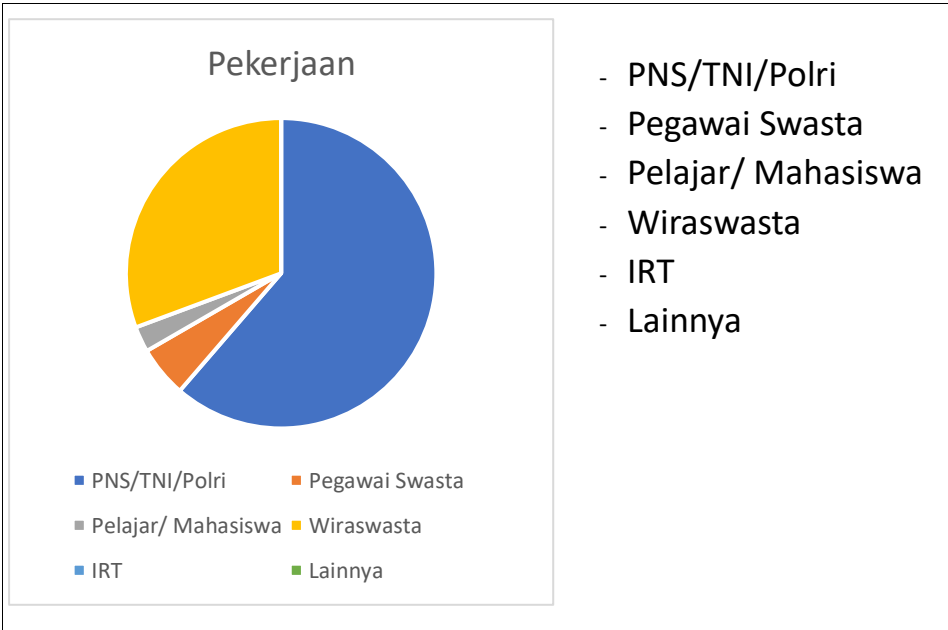
3. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa responden atau mayoritas pengguna layanan pada Balai Diklat Industri Makassar memiliki pekerjaan sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	
		Jumlah	Persentase
1.	PNS/TNI/Polri	46	61,33%
2.	Pegawai Swasta	4	5,33%
3.	Pelajar/ Mahasiswa	2	2,67%
4.	Wiraswasta	23	30,67%
5.	IRT	0	0,00%
6.	Lainnya	0	0,00%
Jumlah		75	100

Tabel 3. Jenis Pekerjaan Responden

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 3. Pekerjaan Responden

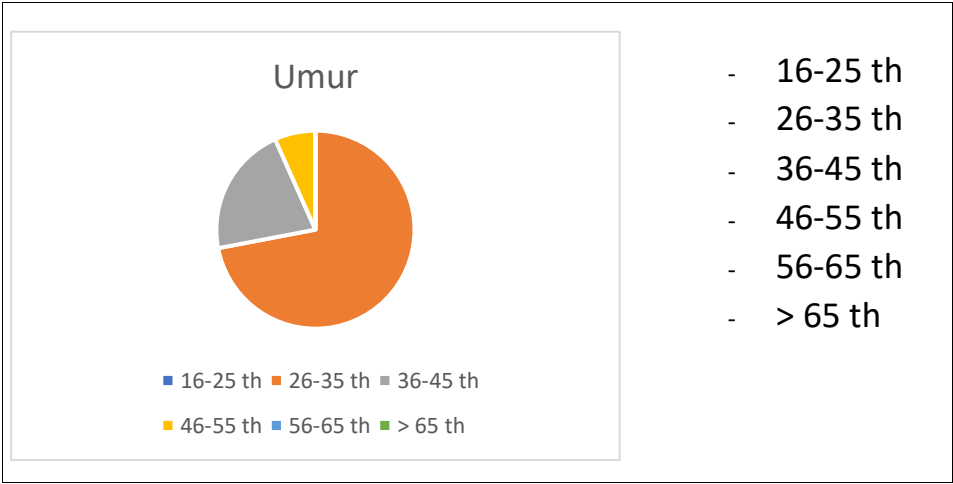
4. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia 26 - 55 Tahun.

No	Rentang Usia	Frekuensi	
		Jumlah	Persentase
1.	16-25 th	0	0,00%
2.	26-35 th	54	72,00%
3.	36 - 45 th	16	21,33%
4.	46 - 55 th	5	6,67%
5.	56 - 65 th	0	0,00%
6.	> 65	0	0,00%
Jumlah		75	100

Tabel 4. Usia Responden

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 4. Usia Responden

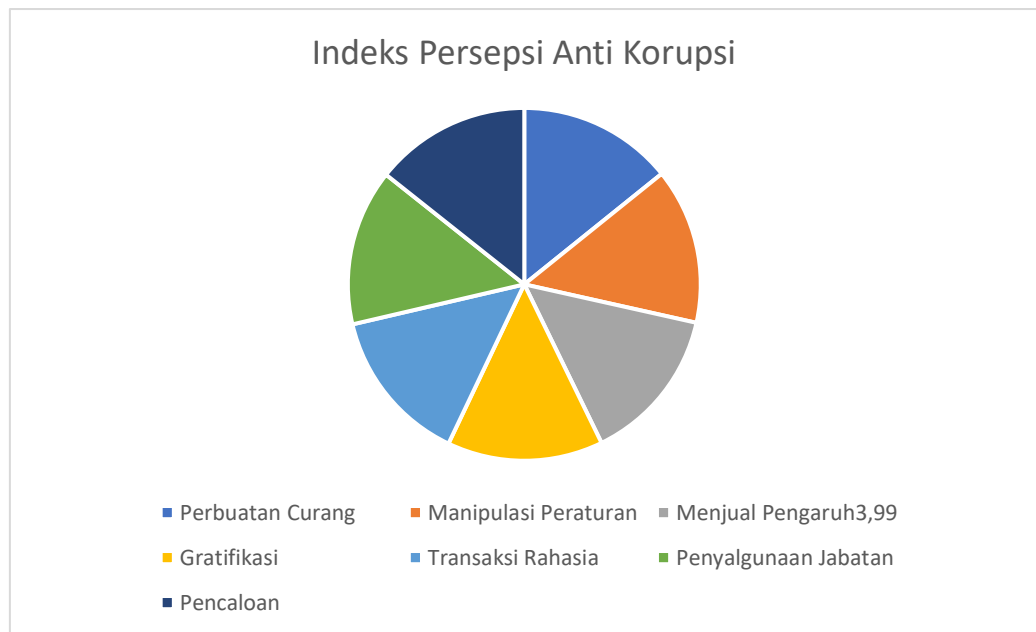
B. Hasil Survei Persepsi Korupsi

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 75 responden. Berdasarkan survei persepsi anti korupsi di Balai Diklat Industri Makassar dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Balai Diklat Industri Makassar sebesar 3,99 berada pada kategori A“ SANGAT BERSIH DARI KORUPSI” (pada interval 3,26 s/d 4,00). Hasil IPK tersebut di atas, terdiri dari 7 ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Jumlah skor dan peringkat pada setiap ruang lingkup pengukuran indeks 27,93 jika dikonversi menjadi persentase menjadi 3,99 yang selanjutnya jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini:

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata - Rata	Kategori
1.	Perbuatan Curang	3,97	Sangat Baik
2.	Manipulasi Peraturan	3,99	Sangat Baik
3.	Menjual Pengaruh	3,99	Sangat Baik
4.	Gratifikasi	3,99	Sangat Baik
5.	Transaksi Rahasia	3,99	Sangat Baik
6.	Penyalagunaan Jabatan	4	Sangat Baik
7.	Pencaloan	4	Sangat Baik
Jumlah		27,93	“A”

Tabel 5. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada BDI Makassar



Grafik 5. Indeks Persepsi Anti Korupsi

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada layanan Kediklatan di Balai Diklat Industri Makassar sebesar $A = 3,99$ dan berada pada kategori Sangat Bersih Dari Korupsi. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut :

1. Pelayanan sudah memadai dan tidak menimbulkan KKN di Balai Diklat Industri Makassar berada pada kategori “Bersih dari Korupsi”.
2. Pelayanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan tanpa imbalan uang/barang di Balai Diklat Industri Makassar berada pada kategori “Sangat Bersih Dari Korupsi”.
3. Tidak Terdapat praktek percaloan atau perantara yang tidak resmi di Balai Diklat Industri Makassar pada kategori “Sangat Bersih Dari Korupsi”.
4. Petugas Pelayanan tidak diskriminatif di Balai Diklat Industri Makassar pada kategori “Bersih Dari Korupsi”.
5. Tidak terdapat pungutan liar di dalam pelayanan di Balai Diklat Industri Makassar pada kategori “Sangat Bersih Dari Korupsi”.
6. Petugas Pelayanan tidak meminta atau menuntut imbalan uang / barang terkait pelayanan yang diberikan di Balai Diklat Industri Makassar pada kategori “Sangat Bersih Dari Korupsi”.
7. Petugas Pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan di Balai Diklat Industri Makassar pada kategori “Sangat Bersih Dari Korupsi”.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pengguna layanan Kediklatan di Balai Diklat Industri Makassar, berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh penilaian responden paling tinggi berada pada ruang lingkup “Tidak terdapat pungutan liar di dalam pelayanan” disusul ruang lingkup “Petugas Pelayanan menolak pemberian uang / barang terkait pelayanan yang diberikan”.

B. Rekomendasi

Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Balai Diklat Industri Makassar, hendaknya lebih meningkatkan pelayanannya khususnya pada ruang lingkup Pelayanan sudah memadai dan tidak menimbulkan KKN dan Petugas Pelayanan tidak diskriminatif kepada masyarakat atau pelanggan.